



---

## Dinamika Politik Dinasti Dan Pengaruhnya Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

Lunetta Ardelia Isywal<sup>1</sup>, Nadila Nuraini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [ardeliaisywal@gmail.com](mailto:ardeliaisywal@gmail.com), [nadilaaaa63@gmail.com](mailto:nadilaaaa63@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*The development of democracy in post-reform Indonesia has brought significant changes through the implementation of regional autonomy and direct regional head elections. However, these developments have also led to the growing phenomenon of political dynasties at both national and regional levels. Political dynasty refers to the practice of maintaining and expanding political power through family relationships within government institutions. This study aims to analyze the dynamics of political dynasties and their influence on the principles of constitutional democracy in Indonesia. The research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results indicate that political dynasties develop due to weak political party regeneration, patronage culture, and high political costs. These practices weaken democratic quality, limit leadership regeneration, and increase the concentration of power within certain families. Therefore, strengthening democracy through political party reform, election supervision, and public political awareness is necessary.*

**Keywords:** Political Dynasty, Constitutional Democracy, Political Oligarchy.

### ABSTRAK

Perkembangan demokrasi pascareformasi di Indonesia membawa perubahan besar melalui penerapan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan fenomena politik dinasti yang semakin berkembang di tingkat pusat maupun daerah. Politik dinasti merupakan praktik kekuasaan yang melibatkan hubungan keluarga untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh politik dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dinasti dan pengaruhnya terhadap prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti berkembang akibat lemahnya kaderisasi partai politik, budaya patronase, dan tingginya biaya politik. Praktik tersebut berdampak terhadap melemahnya kualitas demokrasi, terbatasnya regenerasi kepemimpinan, serta meningkatnya konsentrasi kekuasaan dalam kelompok keluarga tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem demokrasi melalui reformasi partai politik, pengawasan pemilu, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

**Kata Kunci:** Politik Dinasti, Demokrasi Konstitusional, Oligarki Politik

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi tahun 1998 menjadi titik penting perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis melalui pelaksanaan otonomi daerah, pemilu yang lebih terbuka, serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Sistem demokrasi tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintahan yang partisipatif, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperoleh jabatan politik.

Namun, perkembangan demokrasi di Indonesia juga memunculkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah berkembangnya praktik politik dinasti dalam sistem pemerintahan daerah maupun nasional. Politik dinasti merupakan praktik distribusi kekuasaan politik yang berpusat pada hubungan keluarga atau kekerabatan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dalam lingkup tertentu. Fenomena tersebut berkembang cukup signifikan setelah diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung karena membuka ruang bagi elite politik untuk membangun jaringan kekuasaan berbasis keluarga.

Praktik politik dinasti terlihat dalam berbagai daerah di Indonesia, seperti Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya. Dalam banyak kasus, jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif, hingga posisi strategis pemerintahan diisi oleh individu yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga tertentu yang kemudian memunculkan persoalan terhadap kualitas demokrasi dan prinsip kesetaraan politik. Fenomena politik dinasti pada dasarnya tidak secara eksplisit dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena setiap warga negara memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pemerintahan. Akan tetapi, praktik politik dinasti sering kali menimbulkan ketimpangan politik karena kandidat yang berasal dari keluarga pejabat memiliki keuntungan lebih besar dibanding masyarakat umum, baik dari sisi popularitas, jaringan partai, kekuatan ekonomi, maupun akses birokrasi. Keadaan tersebut menyebabkan proses demokrasi cenderung tidak berjalan secara kompetitif dan adil (Maulia, 2024:121).

Selain berdampak terhadap kompetisi politik, politik dinasti juga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional menekankan adanya pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, persamaan hak politik, serta mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam praktik politik dinasti, kekuasaan cenderung terpusat pada kelompok elite tertentu sehingga membuka peluang terjadinya oligarki politik, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya pengawasan pemerintahan (Irwin et al., 2025:1331).

Salah satu contoh konkret politik dinasti di Indonesia dapat dilihat pada keluarga Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten. Dalam perkembangannya, sejumlah anggota keluarga Ratu Atut menduduki berbagai jabatan strategis seperti

---

gubernur, wali kota, wakil gubernur, dan anggota DPR RI. Konsentrasi kekuasaan tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dinamika perkembangan politik dinasti di Indonesia dan pengaruhnya terhadap prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak politik dinasti terhadap kualitas demokrasi serta pentingnya penguatan sistem demokrasi yang lebih transparan, kompetitif, dan berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang tentang Partai Politik, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan politik dinasti dan hak politik warga negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep demokrasi konstitusional, oligarki politik, politik dinasti, serta prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara praktik politik dinasti dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dinamika Politik Dinasti dalam Sistem Politik Indonesia*

Politik dinasti merupakan fenomena politik yang menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga tertentu melalui penguasaan jabatan-jabatan strategis pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, politik dinasti berkembang cukup signifikan setelah era reformasi dan penerapan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Sistem demokrasi lokal yang pada awalnya dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan justru dalam praktiknya membuka ruang bagi elite politik daerah untuk mempertahankan kekuasaan melalui hubungan keluarga. Jabatan politik yang sebelumnya diperoleh melalui kompetisi demokratis kemudian berkembang menjadi sarana regenerasi kekuasaan keluarga secara turun-temurun.

---

Perkembangan politik dinasti di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem politik pascareformasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka melalui pemilihan umum langsung, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem tersebut pada dasarnya bertujuan memperkuat prinsip demokrasi lokal, memperluas partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kepentingan rakyat. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sistem pemilihan langsung justru memunculkan dominasi elite politik lokal yang memanfaatkan pengaruh kekuasaan untuk membangun jaringan politik keluarga.

Politik dinasti berkembang karena adanya hubungan erat antara kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan pengaruh sosial dalam masyarakat. Keluarga pejabat memiliki keuntungan politik yang jauh lebih besar dibanding masyarakat umum karena telah memiliki popularitas, jaringan birokrasi, sumber daya ekonomi, akses partai politik, serta kedekatan dengan kelompok elite daerah. Kondisi tersebut menyebabkan anggota keluarga pejabat lebih mudah memperoleh rekomendasi partai politik dibanding kandidat lain yang tidak memiliki hubungan kekuasaan. Dalam praktiknya, partai politik cenderung mengutamakan kandidat yang dianggap memiliki peluang kemenangan tinggi dibanding menjalankan kaderisasi politik yang berbasis meritokrasi dan kapasitas kepemimpinan (Arifin, 2024: 652). Lemahnya sistem kaderisasi partai politik menjadi salah satu faktor utama berkembangnya politik dinasti di Indonesia. Idealnya, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, regenerasi kepemimpinan, serta rekrutmen politik yang demokratis. Namun dalam praktiknya, banyak partai politik lebih berorientasi pada pragmatisme elektoral. Kandidat yang memiliki modal politik besar, pengaruh sosial tinggi, serta kedekatan dengan elite partai lebih mudah memperoleh dukungan pencalonan. Akibatnya, proses demokrasi internal partai menjadi tidak sehat karena lebih mengutamakan faktor elektabilitas dibanding kualitas kepemimpinan dan kapasitas intelektual kandidat.

Fenomena tersebut terlihat secara nyata dalam berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh paling konkret adalah praktik politik dinasti di Provinsi Banten melalui keluarga Ratu Atut Chosiyah. Setelah menjabat sebagai Gubernur Banten periode 2007–2012 dan 2012–2017, pengaruh politik keluarga Ratu Atut berkembang sangat luas dalam pemerintahan daerah. Sejumlah anggota keluarganya berhasil menduduki berbagai jabatan strategis pemerintahan maupun legislatif. Airin Rachmi Diany menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode, Andika Hazrumy menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, sementara anggota keluarga lainnya menduduki posisi DPRD kabupaten/kota, DPR RI, serta kepala daerah di beberapa wilayah Banten. Konsentrasi kekuasaan tersebut menunjukkan adanya dominasi politik keluarga dalam struktur pemerintahan daerah (Remanu et al., 2025: 10). Dominasi politik keluarga Ratu Atut tidak hanya terlihat dari banyaknya jabatan yang dikuasai anggota keluarganya, tetapi juga dari kuatnya pengaruh politik terhadap birokrasi dan proses pengambilan kebijakan daerah. Dalam praktiknya, jaringan kekuasaan keluarga tersebut mampu memengaruhi

proses pencalonan kepala daerah, distribusi dukungan politik, hingga penguasaan sumber daya ekonomi daerah. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana politik dinasti dapat berkembang menjadi oligarki politik lokal yang sulit disaingi oleh kelompok masyarakat biasa.

Selain di Banten, praktik politik dinasti juga berkembang di berbagai wilayah lain di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, keluarga Yasin Limpo memiliki pengaruh politik yang cukup besar dalam pemerintahan daerah selama bertahun-tahun. Syahrul Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode, sementara anggota keluarganya juga menduduki jabatan politik lainnya di tingkat daerah maupun nasional. Di Sumatera Utara, politik kekerabatan juga terlihat dalam berbagai kontestasi pemilihan kepala daerah yang melibatkan anggota keluarga pejabat sebelumnya. Fenomena serupa terjadi di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, hingga Kalimantan Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik dinasti bukan lagi fenomena terbatas pada satu daerah tertentu, melainkan telah berkembang sebagai pola umum dalam sistem politik lokal Indonesia. Perkembangan politik dinasti juga terlihat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Berbagai penelitian menunjukkan adanya puluhan kandidat kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat aktif maupun mantan pejabat negara. Sebagian besar kandidat tersebut berhasil memenangkan pemilihan karena memiliki dukungan partai politik, jaringan kekuasaan birokrasi, popularitas keluarga, serta kekuatan modal ekonomi yang lebih besar dibanding kandidat lain. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi kekeluargaan masih menjadi faktor penting dalam distribusi kekuasaan politik di Indonesia.

Selain faktor partai politik, budaya patronase politik dalam masyarakat Indonesia juga turut memperkuat berkembangnya politik dinasti. Patronase politik merupakan hubungan politik yang didasarkan pada kedekatan personal, hubungan kekuasaan, serta pertukaran kepentingan antara elite politik dan masyarakat. Dalam praktik demokrasi lokal, masyarakat sering kali memilih kandidat berdasarkan pengaruh keluarga politik tertentu dibanding mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, visi kebijakan, maupun integritas calon pemimpin. Nama besar keluarga pejabat dianggap mampu memberikan jaminan stabilitas politik dan akses kekuasaan sehingga lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat. Budaya paternalistik dalam masyarakat Indonesia juga menyebabkan figur keluarga pejabat lebih mudah diterima dalam kontestasi politik. Masyarakat sering menganggap bahwa anggota keluarga pejabat memiliki kemampuan politik yang sama dengan pendahulunya karena berada dalam lingkungan kekuasaan yang sama. Akibatnya, proses demokrasi cenderung dipengaruhi faktor emosional dan kedekatan sosial dibanding penilaian objektif terhadap kapasitas kepemimpinan kandidat.

Faktor lain yang turut memperkuat politik dinasti adalah tingginya biaya politik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kontestasi politik di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar mulai dari kebutuhan kampanye, media politik, konsolidasi partai, survei elektabilitas, hingga mobilisasi massa. Dalam kondisi tersebut, keluarga pejabat memiliki keuntungan lebih besar karena telah memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan yang

---

mapan. Kandidat dari keluarga politik umumnya lebih mudah memperoleh sponsor politik, dukungan elite partai, hingga akses media dibanding masyarakat biasa yang tidak memiliki modal besar. Tingginya biaya politik pada akhirnya menciptakan ketimpangan kompetisi dalam demokrasi. Kandidat independen atau masyarakat biasa yang memiliki kapasitas kepemimpinan baik sering kali kesulitan bersaing karena terbatasnya modal ekonomi dan dukungan politik. Akibatnya, distribusi kekuasaan politik cenderung berputar dalam kelompok elite keluarga tertentu. Demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga negara pada akhirnya mengalami distorsi akibat dominasi oligarki politik keluarga.

Fenomena politik dinasti menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan prinsip keadilan politik dan distribusi kekuasaan yang merata. Politik dinasti pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan hubungan keluarga dalam jabatan politik, tetapi juga menyangkut persoalan konsentrasi kekuasaan, oligarki politik, lemahnya kaderisasi partai, serta ketimpangan akses masyarakat terhadap kekuasaan politik. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi cenderung berjalan secara prosedural melalui pemilu, tetapi belum sepenuhnya menciptakan kompetisi politik yang substantif dan setara (Insani et al., 2026: 90).

### ***Pengaruh Politik Dinasti terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional di Indonesia***

Politik dinasti memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi konstitusional pada dasarnya menempatkan prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, persamaan politik, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan kekuasaan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam praktiknya, politik dinasti justru menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi kekuasaan dalam kelompok keluarga tertentu yang berpotensi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Salah satu dampak utama politik dinasti adalah melemahnya prinsip persamaan kesempatan dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi kekuasaan. Akan tetapi, praktik politik dinasti menyebabkan adanya ketimpangan kompetisi politik karena kandidat dari keluarga pejabat memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dibanding masyarakat biasa. Keuntungan tersebut meliputi popularitas politik, akses partai, kekuatan ekonomi, jaringan birokrasi, pengaruh sosial, hingga dukungan elite politik. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan politik tidak berjalan secara adil dan setara (Tanuri, Maskur, & Alba, 2025: 72). Dominasi keluarga politik dalam pemilihan umum juga menyebabkan demokrasi hanya berjalan secara formal dan prosedural. Pemilu memang tetap dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, tetapi kualitas kompetisi politik menjadi tidak seimbang. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih kandidat bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan, integritas, maupun program kerja, melainkan karena pengaruh nama besar keluarga politik tertentu. Situasi tersebut menyebabkan demokrasi kehilangan substansi utamanya sebagai sarana kompetisi politik yang sehat dan terbuka.

---

Politik dinasti juga berdampak terhadap melemahnya sistem checks and balances dalam pemerintahan daerah. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan negara harus dibatasi dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Namun apabila jabatan strategis dikuasai oleh anggota keluarga yang sama, maka fungsi pengawasan menjadi tidak berjalan optimal karena adanya konflik kepentingan dan hubungan kekeluargaan dalam struktur pemerintahan.

Kondisi tersebut terlihat secara nyata dalam kasus politik dinasti di Banten. Sejumlah anggota keluarga Ratu Atut Chosiyah menduduki berbagai posisi strategis pemerintahan daerah secara bersamaan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Konsentrasi kekuasaan tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Pada tahun 2013, Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan keluarga dalam pemerintahan berpotensi membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Remanu et al., 2025: 14).

Selain kasus suap Pilkada Lebak, jaringan politik keluarga di Banten juga dikaitkan dengan pengaruh besar terhadap proyek-proyek pemerintahan daerah dan distribusi kekuasaan birokrasi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa politik dinasti tidak hanya memengaruhi proses pemilihan politik, tetapi juga dapat berdampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pengawasan penggunaan kekuasaan negara. Pengaruh politik dinasti juga terlihat terhadap independensi partai politik. Dalam banyak kasus, partai politik hanya menjadi kendaraan elite keluarga untuk mempertahankan kekuasaan politik. Proses pencalonan kepala daerah maupun anggota legislatif lebih banyak dipengaruhi faktor hubungan politik dan tingkat elektabilitas dibanding kualitas kaderisasi partai. Akibatnya, fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan regenerasi kepemimpinan menjadi tidak berjalan optimal.

Partai politik pada akhirnya cenderung dikuasai kelompok elite tertentu yang memiliki pengaruh ekonomi dan kekuasaan besar. Situasi tersebut menyebabkan proses demokrasi internal partai menjadi tertutup dan sulit diakses kader-kader baru yang tidak memiliki kedekatan dengan elite partai. Politik dinasti kemudian memperkuat praktik oligarki politik karena distribusi kekuasaan hanya berputar dalam kelompok keluarga tertentu (Irwin et al., 2025: 1334). Politik dinasti juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Masyarakat dapat memandang bahwa kekuasaan politik hanya dapat diakses oleh kelompok elite tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya. Akibatnya, muncul anggapan bahwa demokrasi hanya menguntungkan kelompok tertentu dan tidak sepenuhnya memberikan kesempatan setara kepada seluruh warga negara. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan partisipasi politik masyarakat serta melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Selain itu, politik dinasti juga menyebabkan terhambatnya regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah. Kandidat potensial yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan kemampuan kepemimpinan sering kali sulit

memperoleh akses politik karena terbatasnya dukungan partai dan modal ekonomi. Jabatan publik akhirnya lebih mudah diwariskan kepada anggota keluarga pejabat dibanding diberikan kepada kader yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan terbaik. Meskipun demikian, politik dinasti secara hukum tidak dapat dilarang sepenuhnya karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam pemerintahan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 membatalkan ketentuan larangan politik dinasti dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dibatasi hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu.

Namun demikian, meskipun tidak dilarang secara hukum, praktik politik dinasti tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak merusak kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Reformasi partai politik menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem kaderisasi yang lebih demokratis dan terbuka. Selain itu, transparansi pendanaan politik, penguatan pengawasan pemilu, pembatasan penyalahgunaan fasilitas kekuasaan, serta pendidikan politik masyarakat juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan semata-mata karena hubungan keluarga politik. Dengan demikian, persoalan utama politik dinasti tidak hanya berkaitan dengan hubungan keluarga dalam jabatan politik, tetapi juga menyangkut dampaknya terhadap kualitas demokrasi, distribusi kekuasaan, prinsip persamaan politik, serta keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Politik dinasti yang berkembang tanpa pengawasan berpotensi memperkuat oligarki politik dan melemahkan tujuan demokrasi konstitusional sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan negara.

## SIMPULAN

Politik dinasti merupakan fenomena politik yang berkembang cukup signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia pascareformasi, terutama setelah diterapkannya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Praktik politik dinasti berkembang melalui hubungan keluarga atau kekerabatan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan politik dalam pemerintahan daerah maupun nasional. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya kaderisasi partai politik, budaya patronase politik, tingginya biaya politik, serta dominasi elite dalam sistem pemilu.

Praktik politik dinasti memberikan pengaruh besar terhadap prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Politik dinasti menyebabkan persaingan politik menjadi tidak seimbang karena kandidat dari keluarga pejabat memiliki keuntungan politik, ekonomi, dan birokrasi yang lebih besar dibanding masyarakat umum. Selain itu, politik dinasti juga berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, mempersempit regenerasi kepemimpinan politik, serta memperkuat oligarki politik dalam pemerintahan. Meskipun politik dinasti tidak dilarang secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, praktik tersebut tetap memerlukan pengawasan yang kuat agar tidak

---

merusak kualitas demokrasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi partai politik, penguatan sistem pengawasan pemilu, transparansi politik, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, F. (2024). Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 636–665.
- Insani, A. P., Meilani, A., & Iman, N. (2026). *Political Dynasties Undermine Democratic Governance and Constitutional Integrity in Indonesia*. *Academia Open*, 11(1), 1–15.
- Irwin, D., Erwiansyah, M. D., Khairullah, D., & Fartini, A. (2025). Dinamika Hukum Konstitusi dan Tantangan Praktik Demokrasi di Indonesia: Studi Kritis terhadap Oligarki Politik dan Reformasi Sistem Pemilu. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1327–1338.
- Maulia, S. T. (2024). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 118–125.
- Remanu, A. J. K., Ramadhani, N. A., Dewi, T. R., Azzahra, A. J., & Ridwan, R. (2025). Dampak Dinasti Politik terhadap Demokrasi Lokal: Kekuasaan Politik Keluarga Ratu Atut di Provinsi Banten. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 10(2), 1–18.
- Tanuri, T., Maskur, A., & Alba, S. (2025). Dinasti Politik: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 62–76.